

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*

Fattia Audina¹

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Edy Akhyary²

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Okparizan³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis : fattiaaudina847@gmail.com

Abstract. *The Sustainable Development Goals (SDG's) have 17 goals from 2015 to 2030. The Sustainable Development Goals (SDG's) are in line with the vision and mission of President Joko Widodo and Vice President Ma'aruf Amin in the 2020-2024 National Medium Term Development Plan. Then it was aligned into the Lingga Regency Medium Term Development Plan 2021-2026. The background of this research is to measure how far the Lingga District Social Service has implemented poverty alleviation in implementing the Sustainable Development Goals (SDG's) Program to reduce poverty in Lingga District. The method used in this research is using a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources and using data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the Van Meter Van Horn Theory with six indicators, namely policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, inter-organizational communication, social, economic, and political environment. The results of the research are based on the first indicator, namely the standards and policy targets have a direct impact on coastal communities in Lingga Regency so that they are said to be poor. The second indicator is resources, the existing resources are in accordance with the standards set even though there are some human resources who still commit fraud. Indicator. The third is that the characteristics of implementing organizations have implemented existing policies in a firm and disciplined manner towards beneficiaries. The fourth indicator is the attitude of the implementers to accept the policy, it's just that there is a lack of response from Social Service employees and supervision is carried out. The fifth indicator is that communication between organizations has been established, it's just that the executors rarely come into the field for various reasons. Thus causing fraud. The sixth indicator, namely the social, economic and political environment, has been implemented with the government's efforts to improve the welfare of the community. The conclusion of this study is that the Lingga District Social Service has implemented a poverty alleviation program based on the Sustainable Development Goals Program in Lingga District.*

Keywords: *Implementation, Poverty, Sustainable Development Goals (SDG's)*

Abstrak. Sustainable Development Goals (SDG's) memiliki 17 tujuan dari tahun 2015 sampai dengan 2030. Sustainable Development Goals (SDG's) sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2020-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tujuan mengukur sudah sampai sejauh mana implementasi pengentasan kemiskinan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Lingga dalam menerapkan Program Sustainable Development Goals (SDG's) untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data secara primer dan sekunder serta menggunakan Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Van Meter Van Horn dengan enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan berimbas langsung kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga sehingga dikatakan miskin. Indikator kedua yaitu sumber daya, sumber daya yang ada sudah sesuai standar yang ditetapkan walaupun ada beberapa oknum SDM yang masih melakukan kecurangan. Indikator. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksana sudah menerapkan kebijakan yang ada dengan tegas dan disiplin terhadap penerima bantuan. Indikator yang keempat yaitu sikap para pelaksana menerima kebijakan hanya saja kurangnya respon pegawai Dinas Sosial serta pengawasan dilakukan. Indikator yang kelima komunikasi antar organisasi sudah terjalin hanya saja jarang para pelaksana turun kelapangan dengan berbagai alasan. Sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan. Indikator yang keenam yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah terlaksana dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Lingga sudah menjalankan Program pengentasan kemiskinan berdasarkan Program Sustainable Development Goals di Kabupaten Lingga.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDG's)

PENDAHULUAN

Setelah konsep *Millenium Development Goals* (MDG's) berakhir pada tahun 2015, konsep tersebut diganti menjadi *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dihadirkan dengan tujuan untuk memenuhi tantangan masa depan dunia. SDG's tersebut berlaku selama 30 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2030 (Handrian & Andry, 2020). Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's), pemerintah Indonesia cukup serius hal tersebut termaktub pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDG's, yang sudah di tandatangani langsung oleh presiden Joko Widodo, Perpres ini di dalamnya berisi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang kemudian menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sebagai dokumen yang di dalamnya mencakup dengan sasaran dan tujuan global tahun 2016 – 2030 (AULIA, 2020).

Persoalan yang paling sulit terhadap berbagai Negara yang kurang berkembang dan sedang berkembang ini ialah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ini masuk pada permasalahan yang sifatnya kemanusiaan. Dengan adanya persoalan kemiskinan tersebut memberikan dampak pada konsekuensi pertanggungjawaban moral untuk kebanyakan orang dalam mencermati kehidupan orang lainnya dalam hal kemiskinan. Kemiskinan ini sendiri mencakup dalam suatu bentuk dari pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia.

Semua kebijakan serta program yang pemerintah berikan ini tentu mempunyai prioritas pokoknya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dengan tidak adanya partisipasi dari semua rakyat, dengan demikian cita-cita ini tidak akan pernah terwujud. Berdasarkan pada uraian ini dijelaskan bahwa permasalahan kemiskinan ini hanya dalam beberapa hal tertentu, sampai pada gilirannya akan menghasilkan keturunan yang akan sulit untuk keluar dari jurang kemiskinan ini (Safitri et al., 2022).

Gambar 1. 1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021 - 2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Lingga 2022

Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau memiliki 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 82 desa dengan jumlah penduduk sekitar 98.633 jiwa. Kabupaten Lingga juga termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang jumlah presentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dengan presentase 13,93%, disusul kemudian oleh Kota Tanjungpinang 9,57 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 7,09 persen. Kabupaten Natuna memiliki persentase penduduk miskin terkecil dengan 4,95 persen pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dari beberapa kabupaten dan kota yang berada di Kepulauan Riau. Yang mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lingga pada Maret 2021 sebesar 12,58 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020, maka selama setahun tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 persen (BPS, 2021).

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga



Sumber: BPS Kabupaten Lingga 2022

Untuk periode bulan Maret 2017 - Maret 2021, menyebutkan bahwa Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 2,48 persen, yakni yang mulanya Rp. 472.384,- per kapita per bulan di Maret 2020 kemudian menjadi Rp. 484.099,- per kapita per bulan di Maret 2021. Persentase untuk kenaikan ini lebih rendah apabila diperbandingkan dengan kenaikan untuk Garis Kemiskinan untuk periode Maret 2019 - Maret 2020, yang mana bahwa kenaikannya ini ialah 9,92 persen atau dari Rp. 429.764,- per kapita per bulan di Maret 2019 kemudian menjadi Rp.472.384,- per kapita per bulan di Maret 2020. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa ada tingkatan kesejahteraan penduduk yang menurun yang terjadi di Kabupaten Lingga yang secara umum di Maret 2021 ini diperbandingkan dengan tahun yang sebelumnya, dengan demikian jumlah penduduk dan persentase kemiskinan akan mengalami kenaikan.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lingga 2017- 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2017	12,35	13,84	395,089
2018	12,13	13,55	411,387
2019	11,56	12,88	429,764
2020	12,45	13,85	472,384
2021	12,58	13,93	484,099

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lingga adapun karakteristik masyarakat yang dikatakan miskin sebagai berikut: pertama memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak, kedua status pekerjaan kepala keluarga sebagai buruh, pekerja bebas/serabutan, petani gurem, ketiga pendidikan anggota keluarganya rendah (misalnya SD/SMP kebawah), keempat kondisi perumahan yang kurang layak (misalnya dinding terluas selain tembok (plasteran, kayu/papan, anyaman bambu batang kayu, bamboo dan lainnya),

jenis lantai terluas terbuat dari ubin/tegel/teraso, atau kayu/papan, semen/bata merah, bamboo, tanah atau lainnya, kelima bahan bakar untuk memasak minyak tanah/arang/briket, dan keenam tidak memiliki aset (misalnya tidak mempunyai AC, mobil, sepeda motor lebih dari 2, dll) dan dengan pendapatan kurang dari Rp535,547/bulan.

Tersediannya kewenangan daerah yang besar ini, dengan demikian pihak pemerintah daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan mempunyai keleluasaan serta pertanggungjawaban yang lebih tinggi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis dan penting berkenaan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut INFID (2016), mengungkapkan bahwa kesuksesan SDG's ini memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan peran penting dari pihak pemerintah daerah, hal ini dikarenakan bahwa pemerintah kota dan pemerintah kabupaten: (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah (Rachmatullah et al., 2021).

Dinas Sosial Kabupaten Lingga dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 mencanangkan program pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Program perlindungan dan jaminan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program pemberdayaan sosial

Oleh karena itu untuk mengentas kasus kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga melalui program *Sustainable Development Goals* (SDG's) memiliki pekerjaan rumah dalam mengentas kemiskinan di daerah sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. Kasus kemiskinan merupakan salah satu dari 17 program yang menjadi target pencapaian dalam SDG's. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang telah saya jelaskan diatas maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lingga.**

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, bagaimana cara mengatasi pengentasan kemiskinan melalui program *sustainable development goals* (SDG's) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lingga. Dengan tujuan penelitian, menjelaskan implementasi program *sustainable development goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Lingga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif berdasarkan teori. Teori substansif merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini teori formal untuk kebutuhan pengembangnya (Abdussamad, 2021). Dengan fokus penelitian pada implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga tahun 2021-2026. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdapat beberapa hal seperti analisis dengan berdasarkan pada kemampuan peneliti dalam menghasilkan kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimana pada tujuan pertama dalam TPB/SDG's merupakan dunia tanpa kemiskinan. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dalam Perpres tersebut Penanggulangan Kemiskinan diartikan sebagai kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari suatu rencana tentunya dapat dijadikan dasar pelaksanaannya, atau disebut juga dengan implementasi suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program dapat dilihat seberapa cocok tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pelaksanaan secara langsung.

Sustainable Development Goals (SDG's) tersebut berlaku selama 15 tahun dari tahun 2016 hingga 2030. Adapun kriteria yang harus digunakan oleh Dinas Sosial guna menuntaskan kemiskinan melalui SDG's adalah memastikan jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memastikan jumlah Keluarga Miskin mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH graduasi, BPNT, dan pemulangan orang telantar. Sementara itu hasil dari pelaksanaan program ini belum efektif, dikarenakan masih ada beberapa actor terkait pelaksanaan yang belum paham terkait SDG's dalam pengentasan kemiskinan dan banyaknya temuan Nepotisme dilapangan.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Adapun indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut (Agustino, 2016):

A. STANDAR DAN SASARAN KEBIJAKAN

Standar dan sasaran kebijakan dalam program *Sustainable Development Goals* (SDG's) ini juga dapat mengukur kinerja Implementasi Kebijakan dengan menekankan standar dan sasaran tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut . (Ahmad et al., 2021).

Berdasarkan wawancara informan dapat saya simpulkan bahwa standar keberhasilan dapat dilihat dalam kinerja oleh pemerintah daerah dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Sosial disitu telah dijelaskan bagaimana standar kebijakan apakah telah sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tidak. Jika dilihat dan di analisis lebih jauh dari data yang dikumpulkan dari hasil observasi. Kabupaten Lingga saat ini masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, hal tersebut dinilai dari kondisi keadaan rumah yang ada di Kabupaten Lingga umumnya sebagian masyarakat di Kabupaten Lingga tinggal di Kawasan pesisir dengan kriteria hunian atau tempat tinggal yang terbuat dari papan atau kayu yang kemudian di sesuaikan dengan standar penilaian dari pusat berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Kementerian Sosial No. 146/HUK/2013.

Kriteria tersebut seperti mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester. Dengan kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, kemudian atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah. Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

B. SUMBER DAYA

Setiap tahap implementasi membutuhkan sumber daya berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi pertimbangan penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini implementasi program *Sustainable Development Goals* dalam pengentasan kemiskinan harus memiliki sumber daya yang cekatan dan mampu menjalankan program dengan baik, tidak hanya sumber daya saja yang baik tetapi mampu mengontrol sumber daya non manusia.

Seperti halnya pelaksana kebijakan, Dinas Sosial terkhususnya harus memiliki seseorang yang memahami program *Sustainable Development Goals* (SDG's), dari segi pendataan hingga penerimaan bantuan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi acuan dan informasi kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goal* (SDG's).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat saya simpulkan dari temuan lapangan terkait dengan sumber daya merupakan salah satu factor kelemahan yang dimiliki yaitu para pelaksana kebijakan masih ada SDM yang belum profesional dalam menjalankan tugas. Dari dinas sendiri masih menemukan bentuk pemberian bahwa dalam pendataan masyarakat miskin untuk pemberian bantuan masih mengutamakan hubungan keluarga atau ada nuansa politis yang dimuat didalamnya.

C. KARAKTERISTIK ORGANISASI PELAKSANA

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang membutuhkan para pelaksana kebijakan yang tegas dan disiplin. Maka dengan ini diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Indikator berfokus pada organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, untuk mendapatkan informasi terkait *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lingga maka informan menjadi acuan peneliti dalam mendapatkan informasi tersebut.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat karakteristik organisasi pelaksana sudah menerapkan kebijakan yang ada dengan tegas dan disiplin terhadap penerima bantuan. Dengan bekerja sama dengan berbagai Dinas terkait yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lingga karena kemiskinan ini merupakan isu yang krostating (lintas sektor).

D. SIKAP PARA PELAKSANA

Sikap para pelaksana (*disposisi*) menurut teori Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dimulai dari penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana, sampai sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sikap menerima atau menolak pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi

kebijakan publik. Sikap para pelaksana ini termasuk hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu sikap Dinas terhadap kebijakan mempengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengantasan kemiskinan di Kabupaten Lingga.

Dari beberapa informan yang telah peneliti wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana sangat dibutuhkan dalam hal ini, sangat menjadi penentu dalam berhasil tidaknya pengimplementasian program. Bisa di ambil kesimpulan sikap dari para pelaksana dalam penerapan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) menerima kebijakan. Hanya saja kurangnya respon pegawai Dinas Sosial serta pengawasan dilakukan. Dilakukan satu tahun sekali itu pun dilakukan oleh BPKP kemudian kejelasan mendapat bantuan belum teratur, dan kesiapan para pelaksananya kurang cepat saat dibutuhkan.

E. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI

Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin sedikit kesalahan yang terjadi. Sulit untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan tanpa kejelasan dan konsistensi serta kepatuhan terhadapnya. Dengan kejelasan ini, pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam organisasi publik, seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Dalam hal ini merujuk pada koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan para pelaku pelayanan sosial untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dijalin oleh agen pelaksana untuk para penerima bantuan sudah terjalin hanya saja jaranganya para pelaksana turun kelapangan dengan berbagai alasan. Sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pendataan. Oleh karena itu pentingnya komunikasi yang dilakukan para pelaksana terhadap desa dan penerima untuk hasil yang optimal.

F. LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

Implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak terbatas pada proses implementasi suatu kebijakan, tetapi juga mencakup tindakan atau perbuatan individu dan kelompok dalam pemerintahan, serta lembaga administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan, dan berkaitan erat dengan memperhatikan hal-

hal yang berdampak pada tujuan yang ingin dicapai berbagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi setelah rencana tersebut dirumuskan, dan dampak dari rencana kebijakan tersebut. Variabel ini meliputi sumber daya sosial, ekonomi dan politik yang dapat mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan. Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDG's) karakteristik aktor dalam hal ini melalui sifat opini publik yang mendukung atau menentang lingkungan. Dan apakah elit politik mendukung implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDG's) ini.

Dari pemaparan informan – informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari segi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah terlaksana dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat hanya saja dalam pengentasan kemiskinan memerlukan proses yang panjang untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* dunia tanpa kemiskinan. Dari dampak bantuan yang diberikan program BPNT dan PKH masyarakat merasa sangat terbantu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) Dalam Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga sudah dilaksanakan hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, hal tersebut dapat dilihat dari temuan berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dapat di simpulkan bahwa hal tersebut dinilai dari kondisi keadaan rumah yang ada di Kabupaten Lingga umumnya sebagian masyarakat di Kabupaten Lingga tinggal di Kawasan pesisir dengan kriteria hunian atau tempat tinggal yang terbuat dari papan atau kayu yang kemudian di sesuaikan dengan standar penilaian dari pusat berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Kementrian Sosial

2. Sumber daya

Dapat disimpulkan di Dinas Sosial masih ada SDM yang belum profesional dalam menjalankan tugas. Dari dinas sendiri masih menemukan bentuk pemberian bahwa dalam pendataan masyarakat miskin untuk pemberian bantuan masih mengutamakan hubungan keluarga atau ada nuansa politis yang dimuat didalamnya.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa tingkat karakteristik organisasi pelaksana sudah menerapkan kebijakan yang ada dengan tegas dan disiplin terhadap penerima bantuan. Dengan bekerja sama dengan berbagai Dinas terkait yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lingga karena kemiskinan ini merupakan isu yang krostating (lintas sektor).

4. Sikap para pelaksana

Dapat di ambil kesimpulan sikap dari para pelaksana dalam penerapan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) menerima kebijakan. Hanya saja kurangnya respon pegawai Dinas Sosial serta pengawasan dilakukan. Dilakukan satu tahun sekali itu pun dilakukan oleh BPKP kemudian kejelasan mendapat bantuan belum teratur, dan kesiapan para pelaksananya kurang cepat saat dibutuhkan.

5. Komunikasi antar organisasi

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dijalin oleh agen pelaksana untuk para penerima bantuan sudah terjalin hanya saja jarang nya para pelaksana turun kelapangan dengan berbagai alasan. Sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pendataan. Oleh karena itu pentingnya komunikasi yang dilakukan para pelaksana terhadap desa dan penerima untuk hasil yang optimal.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dapat menyimpulkan bahwa dari segi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah terlaksana dengan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat hanya saja dalam pengentasan kemiskinan memerlukan proses yang panjang untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* dunia tanpa kemsikinan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yaitu dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) Dalam Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga sebaiknya program yang diberikan lebih terstruktur dan sumber daya yang tersedia lebih disiplin dalam menerapkan peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pendataan penerima bantuan. Kemudian ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Hendaknya pemeritah daerah lebih memperhatikan pembagunan perumahan Kawasan pesisir hingga dikatakan layak berdasarkan kareakteristik yang diberikan oleh kementrian

sosial. Dengan begitu standar dan sasaran kebijakan bisa menjawab tantangan di daerah masing – masing dalam pengentasan kemiskinan.

2. Sumber daya

Dinas Sosial Kabupaten Lingga diharapkan mampu meningkatkan lagi Sumber Daya yang ada, baik itu dari sumber daya manusia maupun Sumber Daya yang berkenaan dengan sarana dan prasarana. Dalam menjalankan program *Sustainable Development Goals* untuk pengentasan kemiskinan dapat melakukan pelatihan dan pendisiplinan terkait sumber daya manusia.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Dinas Sosial sudah menerapkan kebijakan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam pengentasan kemiskinan dengan tegas dan disiplin serta harus lebih meningkatkan hubungan kerjasama lintas sektor dengan dinas – dinas lainnya.

4. Sikap para pelaksana

Dinas Sosial diharapkan mampu lebih meningkatkan peran dalam merespon keluhan pihak desa dan masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi.

5. Komunikasi antar organisasi

Dinas Sosial diharapkan mampu lebih intensif dalam menjalin komunikasi terhadap pihak desa – desa terkait pedoman pendataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dinas Sosial diharapkan lebih ekstra lagi dalam menangani pengentasan kemiskinan ini karena pengentasan kemiskinan memerlukan proses yang panjang untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* dunia tanpa kemiskinan di tingkat daerah. Dengan lebih meningkatkan monitoring sehingga data yang tersedia tepat sasaran.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1 ed.). Syakir Media Press.

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (keenam). alfabeta.

Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. ... *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).

AULIA, S. H. (2020). *Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016 – 2019)*. fisip.

- BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*. Website BPS.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1).
- Rachmatullah, R., Endaryanto, T., & Affandi, M. I. (2021). Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGS) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *TATALOKA*, 23(2). <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.239-251>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *BASICEDU*, 6(4), 7096–7106.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (keduapuluh). alfabeta.